

## **Analysis Of Regional Economic Improvement Through Micro, Small, Medium Enterprises In Managing Local Wisdom Product In Ternate North Maluku Province**

**Darsanto<sup>1</sup>, Khasan Effendy<sup>2</sup>, Nuryanto<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak Jakarta

Email : [darsantoipdn33@gmail.com](mailto:darsantoipdn33@gmail.com)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article history:</b></p> <p>Article Accepted: 09 July 2021 Publication : 16 July 2021</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Local Government, Economic Improvement, Micro, Small and Medium Enterprises dan local Wisdom</p>	<p><i>The Implementation of regional development in the autonomy era is in accordance with Law Number 23 RI of 2014 concerning Regional Government based on regional capacities and initiatives. Where there are several development problem faced. Especially in Ternate City, when viewed from the perspective of population welfare, the problem of poverty and unemployment are still considered quite high. Therefore, strategic efforts are needed to deal with the problem in question. This paper aims to, 1) Describe the government's efforts improved the regional economy through micro, small, and medium enterprises in managing local wisdom products in Ternate City, North Maluku Province; 2) Describe the factors that influenced efforts improved the regional economy through micro, small, medium enterprises in managing local wisdom product. The approach of this study was qualitative and descriptive method. The theory used to analyzed the main focus was The of Manpower Creation by Mansour Fakhri. To saw the factors that affect the productivity of micro, small and medium enterprises used the concept proposed by Wilantara and Susilawati. The data sources were primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews, observation and documentation carried out in Ternate City by involving the government and micro, small and medium enterprises by selecting a number of samples based on the snowball method. The results of this study indicate that the efforts made by the Local Government of Ternate City to improve its economy through micro, small, medium enterprises based on local wisdom potentiality are considered quite effective, because able to encourage and maintain productivity of business actors. These efforts generally take the form of development, fostering and provision of business capital that are regulative, service, facilitative and evaluative roles. Although, there are several obstacles that are quite prominent and influential, including the lack of business capital, product marketing, inefficiency of bureaucraties services, low human resource capacity for technology and limited raw materials. Therefore, it is recommended that there be improvements in term of increasing business capital, marketing creativity, supply of raw materials and increasing the latest technology-based education and training activities.</i></p>
<p><b>Article Info</b></p> <p><b>Article history:</b></p> <p>Article Accepted: 09 July 2021 Publication : 16 July 2021</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Pemerintah Daerah, Peningkatan perekonomian,</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Pembangunan daerah di era otonomi sesuai Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan pada kemampuan dan prakarsa daerah. Dimana, selalu ada pembangunan yang dihadapi. Khusus di Kota Ternate, jika dilihat dari sisi kesejahteraan penduduk, masalah kemiskinan dan pengangguran dinilai masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk menangani persoalan dimaksud. Tulisan ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan upaya pemerintah terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui usaha mikro kecil menengah dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara; 2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui usaha mikro kecil menengah dalam mengelola produk kearifan lokal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif, Teori yang digunakan untuk menganalisis fokus utama adalah <i>Teori Penciptaan Tenaga Kerja</i>, oleh Mansour Fakhri. Sedangkan,</p>

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha mikro kecil menengah menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Wilantara dan Susilawati. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kota Ternate dengan melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dengan memilih sejumlah sampel berdasarkan metode *snowball*. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate terhadap peningkatan perekonomiannya melalui usaha mikro kecil menengah berbasis potensi kearifan lokal dinilai cukup efektif sebab, mampu mendorong dan mempertahankan produktivitas pelaku usaha. Upaya dimaksud berupa pengembangan, pembinaan dan penyediaan modal usaha bagi pelaku UMKM yang umumnya bersifat *regulatif, service, fasilitatif* dan *evaluatif*. Meskipun, terdapat beberapa kendala yang cukup mempengaruhi diantaranya yaitu minimnya modal usaha, masalah pemasaran produk, inefisiensi pelayanan birokrasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia terhadap pemanfaatan teknologi terkini serta keterbatasan bahan baku. Oleh karena itu, disarankan agar ada perbaikan dari sisi peningkatan modal usaha, kreativitas pemasaran, pelayanan birokrasi, penyediaan bahan baku serta memperbanyak kegiatan diklat berbasis teknologi terkini.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

**Corresponding Author:**

**Darsanto**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

(IPDN), Cilandak Jakarta

Email : [darsantoipdn33@gmail.com](mailto:darsantoipdn33@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup positif, hal tersebut terlihat pada perkembangan pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia yang semakin baik. Dimana, hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya perbaikan yang senantiasa dilakukan oleh bangsa ini secara berkesinambungan.

Pada perjalanannya dalam rangka mencapai tujuan bernegara, terdapat berbagai tantangan dan hambatan baik itu yang bersumber dari internal bangsa maupun dari luar. Dimana, secara internal instabilitas berbagai situasi politik, ekonomi dan sosial budaya menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan yang kemudian dapat mengganggu program-program pembangunan. Sedangkan dari sisi eksternal arus globalisasi dan digitalisasi yang begitu cepat dan terbuka menjadi peluang sekaligus ancaman yang cukup serius bagi kemajuan negeri ini, Oleh karena itu, tuntutan untuk menyesuaikan dengan kemajuan globalisasi menjadi penting dan wajib, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan serta karakter bangsa.

Untuk menjawab tantangan global dengan arus ekonomi dunia yang begitu cepat, maka diperlukan adanya tindakan-tindakan protektif secara internal guna menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan ekonomi yang ada. Maka, negara diharuskan untuk proaktif membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada perbaikan dan peningkatan pembangunan di seluruh wilayah negara Indonesia, baik itu pembangunan secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya.

Pemerintah sebagai pemilik kewenangan yang sah dituntut untuk mampu melayani dan menggerakkan roda kehidupan bersama sesuai dengan fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dalam pasal 1 ayat (2) yang menyebut bahwa “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Sehingga, berdasarkan pada fungsi pemerintah tersebut pemerintah berwenang

untuk merumuskan beberapa regulasi atau kebijakan dalam rangka menunjang percepatan pembangunan baik berskala nasional maupun daerah.

Khusus terkait pembangunan di daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang meletakkan pendekatan pembangunan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (6) dalam undang-undang tersebut yang menyebut bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Membangun daerah berdasarkan prinsip otonomi dijelaskan oleh Djohermansyah (2014 : 181-182) yang menyebut bahwa secara teoritik otonomi berasal dari dua sumber. Pertama, dari pemerintah pusat berupa pelimpahan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien, efektif dan demokratis. Kedua, dari kondisi sosial budaya masyarakat daerah berupa nilai, kemampuan dan pranata sosial yang telah lama melekat pada praktek pengaturan kehidupan masyarakat agar hak-hak masyarakat terlindungi, rasa keadilan masyarakat terjamin dan urusan pemerintahan berjalan dengan lancar. Sehingga, berdasarkan pada pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa pola pembangunan di daerah dapat dilakukan melalui dua strategi, yang pertama melaksanakan urusan-urusan diserahkan oleh pemerintah pusat melalui prinsip desentralisasi, yang kedua melalui pengembangan potensi yang bersumber dari sosial budaya masyarakat.

Bermodalkan pada fungsi dan tujuan yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah wajib menemukan solusi terhadap segala persoalan yang ada pada masyarakatnya, persoalan-persoalan dimaksud diantaranya tingginya angka masyarakat miskin dan jumlah pengangguran. Dimana, khususnya di Kota Ternate persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan tersendiri dimana sesuai dengan perolehan data yang ada diketahui bahwa angka masyarakat miskin dan jumlah pengangguran masih cukup tinggi, sebagaimana tergambar pada table berikut

**Tabel 1.** Angka Masyarakat Miskin dan Pengangguran Kota Ternate Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
1	2017	215.524	7.538	6.041
2	2018	218.028	5.679	6.760
3	2019	219.495	6.361	7.250

**Sumber :** -BPS Kota Ternate Tahun 2018, 2019, dan 2020  
- DisDukCapil Kota Ternate, Tahun 2020

Berdasarkan pada data di atas, terungkap bahwa jumlah masyarakat miskin dan angka pengangguran di Kota Ternate dalam kurung waktu tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif dan stagnan, bahkan justru terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2019.

Kota Ternate sebagai salah satu kota warisan sejarah, sejak dahulu terkenal hasil alamnya berupa rempah-rempah seperti cengkeh, palah, kopra dan lain-lain yang kemudian menjadi daya tarik dan salah satu alasan daerah ini untuk didatangi oleh negara asing pada saat itu. Dimana, masyarakat setempat pun menjadikan sektor tersebut sebagai mata pencaharian unggulan secara turun temurun yang tentunya menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat. Akan tetapi, terhitung sejak tahun 2016 nilai jual hasil perkebunan tersebut mengalami penurunan nilai jual yang cukup signifikan. Sebagai contoh hasil tanaman cengkeh yang sebelum tahun 2016 mencapai nilai penjualan menyentuh angka sekitar Rp.120.000/Kg, namun saat ini hanya berkisar pada angka di bawah Rp.100.000/Kg, situasi ini tentu sangat merugikan masyarakat, yang selanjutnya dapat menjadi salah satu pemicu menurunnya angka pendapatan masyarakat dari sektor perkebunan.

Pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pembangunan tentunya harus lebih kreatif dan inovatif untuk menemukan alternatif-alternatif solutif dalam rangka menangani segala persolan ekonomi, dimana masih terdapat cara lain yang

dapat diterapkan, salah satunya melalui pengembangan potensi yang bersumber dari sosial budaya masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Djohermansyah pada paragraf sebelumnya. Dimana, terkait potensi sosial budaya, Kota Ternate termasuk salah satu Kota Warisan Budaya memiliki banyak potensi yang cukup produktif untuk dikembangkan. Adapun, salah warisan budaya yang dapat dikembangkan adalah hasil karya masyarakat yang terwujud dalam bentuk barang dan bahan yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Pilihan membangun ekonomi masyarakat berbasis sosial budaya dalam bentuk pengembangan produk kearifan lokal, diprediksikan cukup efektif untuk diterapkan sebab dinilai dapat mendukung kemandirian dan pemberdayaan masyarakat jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Anriques dalam Bambang Sutikno dan Jati Batoro (2017 : 8) memandang bahwa peningkatan budaya masyarakat atau kearifan lokal sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan untuk pembangunan lingkungan masyarakat selanjutnya. Selain itu, dipertegas pula oleh Oding S (2002) dalam buku Hermanto Suaib (2017) bahwa kearifan lokal dicirikan dengan dasar kemandirian dan keswadayaan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, menjamin daya hidup dan berkelanjutan, mendorong teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya dan memberikan kesempatan untuk memahami dan memfasilitasi perancangan pendekatan program yang sesuai.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan lebih lanjut kelompok pelaku usaha baik secara perorangan maupun kelompok. Sehingga, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya, penulis bermaksud untuk menyusun sebuah kajian ilmiah yang khusus membahas tentang peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi kearifan lokal. Dimana, untuk memfokuskan diri dalam penyusunan tulisan dimaksud penulis menetapkan judul **“Analisis Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui UMKM Dalam Mengelola Produk Kearifan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara”**.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, teridentifikasi bahwa kemiskinan dan tingginya angka pengangguran masih menjadi masalah serius dalam pembangunan manusia di Kota Ternate yang perlu untuk dicarikan solusinya. Sehingga, dirumuskan bahwa kajian dalam tulisan ini berusaha untuk mengungkap dan menganalisis:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tentunya penyusunan tulisan ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan upaya pemerintah terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui usaha mikro kecil menengah dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara; 2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui usaha mikro kecil menengah dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Berbicara terkait upaya dan tindakan pembangunan masyarakat, tidak lepas dari campur tangan pemerintah selaku pemilik kewenangan yang sah untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama, sebab defenisi pemerintah menurut Erliana H (2014 : 21) adalah aktivitas pelayanan yang menjamin bekerjanya lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya unit-unit pemerintahan baik internal maupun eksternal terhadap para warganya. Berdasarkan pada defenisi di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah harus senantiasa hadir terkait pemenuhan-pemenuhan kebutuhan publik, termasuk dalam hal aktivitas ekonomi warganya.

Peningkatan perekomian berbasis sosial budaya dan kearifan lokal tidak lepas dari pandangan paradigma *people centered development* yang menurut Korten dalam Jamaludin (2016 : 22) bahwa paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan keragaman lokal yang mandiri. Dimana, Tjokrowinoto (Jamaludin 2016 : 22) menyebut bahwa dalam *people centered*

*development* pemerintah sebagai katalis dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat pada kemandirian lokal. Penjelasan tersebut mempertegas bahwa pemanfaatan potensi lokal dapat menjadi salah satu alternatif produktif untuk meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

Adapun, upaya peningkatan perekonomian dimaksud merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai pembangunan ekonomi secara umum dan pertumbuhan ekonomi secara khusus yang dapat dilihat melalui ukuran-ukuran secara kuantitatif yang menurut Wilantara dan Susilawati (2016: 103) terdiri dari meningkatnya pendapatan perkapita, produk nasional, jumlah tabungan dan penyerapan angka kerja.

Pengertian UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Sedangkan pengertian tentang kearifan lokal menurut Mattuada dalam Sumijati dkk, (2002 : 100) adalah wawasan atau cara pandang menyeluruh yang bersumber dari tradisi kehidupan. Jadi, yang dimaksud dengan produk kearifan lokal pada prinsipnya adalah barang maupun bahan hasil kreasi dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat melalui usaha-usaha mandiri (UMKM) dengan menjadikan ciri lokalitas maupun tradisi masyarakat sebagai orientasi usaha maupun ciri khas yang memiliki nilai tambah tersendiri dalam produk tersebut

Fokus peningkatan perekonomian daerah dalam tulisan ini terkait kegiatan perekonomian masyarakat berbasis usaha mikro kecil dan menengah. Dimana, upaya dimaksud berupa perbaikan jenjang perekonomian daerah melalui usaha mandiri dan produktif dari masyarakat berbasis kearifan lokal dengan memperhatikan proses pengelolaan usaha serta intervensi dari pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan perekonomian dapat pula berupa keadaan yang menunjukkan upaya peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengintervensi salah satu sumber ekonomi dan mengoptimalkan beberapa upaya atau kebijakan strategis, sehingga dapat memicu gerakan ekonomi di sektor ekonomi lainnya yang kemudian diharapkan dapat berefek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara khusus dan pembangunan ekonomi secara umum.

Untuk membantu menganalisis dan mengkaji lebih lanjut upaya produktif yang dilakukan oleh pemerintah, penulis menggunakan salah satu teori sebagai pisau analisis. Adapun, teori dimaksud yaitu *Teori Penciptaan Tenaga Kerja* yang dikemukakan oleh Mansour Fakih (2013 : 62-63), sebab dianggap berhubungan langsung dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan melalui pengembangan usaha-usaha berskala mikro kecil dan menengah (UMKM). Dimana, dalam teori tersebut merekomendasikan beberapa upaya antara lain:

1. Pengembangan pedagang eceran, pedagang kecil atau pedangan kaki lima
2. Pembinaan berbasis peningkatan *skill* tenaga kerja dan kemampuan manajemen bagi pengusaha kerajinan tangan dan industri kecil dengan membangun sentra-sentra pembinaan industri kecil dan kerajinan.
3. Peningkatan ketersediaan modal usaha bagi sektor informal.

Selain itu, untuk mengetahui dan mengkaji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM berbasis produk kearifan lokal digunakan konsep yang dikemukakan oleh Wilantara dan Susilawati (2016 : 4) yang terdiri dari faktor internal yaitu a) akses pembiayaan usaha terbatas; b) mahalnya biaya infrastruktur; c) layanan birokrasi yang tidak efisien. Kemudian faktor eksternal yaitu a) Kelembagaan dan SDM; b) Pemasaran dan teknologi; serta c) modal intelektual (pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif yang mendeskripsikan secara mendalam mengenai gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta, gejala sosial, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang

berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan suatu wilayah di sektor ekonomi. Dimana, data yang diperlukan terdiri data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan telaah dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model *Miles and Huberman* yang dilakukan diawali dengan reduksi data, penyajian dan membuat kesimpulan. Selain itu, untuk menguji kredibilitas perolehan data digunakan model *Triangulasi*

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Upaya peningkatan perekonomian daerah Melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan lokal Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Upaya Pemerintah Daerah Kota Ternate dalam rangka meningkatkan perekonomiannya melalui UMKM berbasis produk kearifan lokal, dinilai sebagai salah satu alternatif solutif, yang kemudian dapat menjadi pemantik bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah secara umum. Adapun, upaya dimaksud setelah merujuk pada Teori Penciptaan tenaga kerja yang dikemukakan oleh Mansour Fakhri, 2013 : 62-63) serta menganalisis sejumlah data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara dan dokumen dengan melibatkan unsur pemerintah daerah melalui OPD terkait dan beberapa pelaku UMKM terungkap bahwa upaya peningkatkan perekonomian dimaksud terdiri dari :

1) **Pengembangan sektor informal/UMKM**, berupa pengembangan pedagang eceran, pedagang kecil, pedagang kaki lima dan pengusaha lemah lainnya, termasuk didalamnya UMKM. Dimana, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Ternate cukup proaktif dalam rangka upaya-upaya pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal sebagai pedagang lemah yang harus dikembangkan. Adapun, upaya dimaksud yaitu memfasilitasi pengembangan usaha berupa fasilitasi pemberian bantuan bahan dan barang pendukung produksi UMKM dan fasilitasi penyediaan akses pemasaran produk, juga upaya pelaksanaan pengembangan UMKM berupa penyediaan data UMKM dengan memfasilitasi dan mempermudah akses pengurusan perizinan usaha dan melakukan penilaian serta evaluasi UMKM berbasis data.

Berdasarkan pada perolehan sejumlah data dan fakta yang ada, dapat dikemukakan bahwa upaya pengembangan sektor informal dalam hal ini UMKM di Kota Ternate oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada prinsipnya diwujudkan melalui beberapa tindakan antara lain :

- a. Pelayanan prima dengan mempermudah akses pengurusan izin usaha dan menyediakan data UMKM secara tertib untuk dimanfaatkan lebih lanjut sebagai basis data dalam memberikan sejumlah bantuan.
- b. Fasilitasi UMKM melalui pemberian sejumlah bantuan dalam bentuk alat dan bahan untuk mendukung kualitas produk, serta menyediakan sarana untuk kebutuhan pemasaran, termasuk dalam hal promosi produk untuk dapat mendorong pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal.
- c. Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah Kota Ternate agar lebih menyentuh langsung terhadap pengembangan UMKM

Adapun, beberapa tindakan tersebut di atas, jika dipahami lebih lanjut, umumnya berupa peran-peran yang berorientasi pada optimalisasi *service, fasilitatif* dan *regulatif*.

2) **Pembinaan Pengusaha Kerajinan Tangan dan industri Serta Sektor Informal Lainnya/UMKM**, yaitu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan tata kelola usaha dari pelaku UMKM. Dimana, upaya dimaksud umumnya berupa penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar

daerah dengan melibatkan sejumlah pelaku UMKM yang secara legal terdaftar dan diakui oleh pemerintah sebagai peserta untuk meningkatkan kemampuan produksi dan tata kelola usaha. Selain itu, Pemerintah daerah juga proaktif untuk menginformasikan dan memfasilitasi UMKM dalam bentuk pendampingan untuk mengurus dan menyiapkan sejumlah kebutuhan administratif usaha, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memperoleh sejumlah program bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lain. Sehingga, dalam upaya pembinaan tersebut Pemerintah Daerah Kota Ternate lebih banyak melakukan peran-perannya yang bersifat *service, fasilitatif dan informatif*.

- 3) **Peningkatan Ketersediaan Modal Usaha bagi Sektor Informal/UMKM**, merupakan upaya yang dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan permodalan bagi UMKM dalam rangka mempertahankan eksistensi usaha sekaligus untuk memperbesar volume usaha. Dimana, Pemerintah Daerah Kota Ternate melalui OPD terkait cukup responsif terhadap persoalan permodalan bagi UMKM, sebab seluruh Narasumber baik dari unsur pemerintah daerah maupun dari pelaku UMKM mengakui bahwa masalah permodalan menjadi masalah utama dalam aktivitas ekonomi UMKM. Namun dikarenakan adanya regulasi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat (7) yang mengharuskan agar penyediaan dana oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank. Dimana regulasi tersebut menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah untuk dapat memberikan bantuan modal secara langsung dan tunai kepada pelaku usaha, sehingga upaya-upaya terkait untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM harus dilaksanakan dalam bentuk lain..

Kebijakan pembatasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan bantuan modal usaha secara tunai kepada UMKM, disatu sisi cukup mempersulit ruang gerak Pemerintah Daerah untuk mengembangkan UMKM dari sisi permodalan. Sehingga, satu-satunya cara yang dilakukan oleh OPD terkait adalah dengan menjalankan fungsi-fungsi fasilitasi serta menjadi mediator antara pelaku UMKM dan Penyedia modal usaha baik itu dari Pemerintah Pusat, BUMN maupun yang lainnya. Dimana, upaya dimaksud dilakukan dengan menyediakan dan melengkapi data UMKM Kota Ternate yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan penilaian dan evaluasi dalam rangka mendapatkan bantuan permodalan.

Akan tetapi, khusus di Kota Ternate terdapat program Dana Pembangunan dan Partisipatif Kelurahan (DPPK) yang salah satu sasaran kegiatannya adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat yang pemanfaatan anggarannya diantaranya berupa pemberian bantuan permodalan bagi UMKM, namun, tetap mengacu pada hasil kesepakatan dari musyawarah masyarakat kelurahan setempat.

Berdasarkan pada uraian yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa upaya pemerintah Kota Ternate dalam rangka meningkatkan ketersediaan modal usaha bagi pelaku UMKM lebih banyak dilakukan kepada fungsi-fungsi administratif dan mediasi dalam rangka memfasilitasi, melayani dan memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapat ruang untuk memberikan bantuan modal usaha secara tunai melalui program DPPK, namun tetap disesuaikan dengan hasil musyawarah.

#### **4.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui UMKM Dalam Mengelola Produk Kearifan Lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara**

Sesuai dengan analisis terhadap hasil laporan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 dapat dikemukakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat produktivitas UMKM adalah *permodalan, pemasaran dan bahan baku*. Sedangkan

secara teoritis yang kemudian dicocokkan dengan data empiris diketahui bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM berbasis produk kearifan lokal antara lain :

**1) Faktor Internal** yaitu faktor yang bersumber dari dalam, dimana faktor dimaksud terdiri dari :

1. *Keterbatasan modal usaha* yaitu menyangkut kebutuhan penganggaran usaha dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha serta perluasan volume usaha. Dimana, kondisi UMKM di Kota Ternate hingga tahun 2020 masih memerlukan tambahan modal usaha.
2. *Mahalnya biaya infrastruktur* yaitu menyangkut kebutuhan bahan baku serta barang pendukung produksi yang terkategori mahal serta masih diperoleh dari daerah lain, misalnya bahan baku kain batik, kemasan produk, alat produksi dan lain-lain, yang kemudian menjadi penyebab tingginya nilai jual produk kearifan lokal yang dihasilkan oleh UMKM.
3. *Pelayanan birokrasi yang kurang efisien* yaitu menyangkut cara kerja intitusi pemerintah dalam mengatur dan melayani UMKM yang dinilai masih kurang maksimal, sehingga diperlukan beberapa perbaikan maupun peningkatan, khususnya dari sisi sosialisasi dan penyebaran informasi terkait program dan kebijakan menyangkut UMKM yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat, sebab masih terdapat sejumlah UMKM yang belum terdaftar secara legal di insrtansi pemerintahan.

**2) Faktor eksternal** yaitu faktor yang bersumber dari luar, dimana faktor dimaksud terdiri dari :

1. *Pemasaran*, adalah menyangkut kebutuhan penjualan barang maupun bahan yang dihasilkan oleh UMKM kepada konsumen, dimana pelaku UMKM berbasis kearifan lokal umumnya mengalami keterbatasan dalam hal konsumen, yang umumnya didominasi oleh wisatawan maupun penduduk lokal yang membeli produk UMKM hanya untuk keperluan tertentu seperti oleh-oleh dan lain-lain. Selain itu, daya saing produk yang cukup rendah di pasar umum dengan tawaran harga yang terbilang mahal menjadi kendala tersendiri bagi produk UMKM berbasis kearifan lokal untuk bersaing di dunia pasar.
2. *Kelembagaan dan SDM*, yaitu menyangkut status lembaga/tempat usaha bagi UMKM serta kapasitas Sumber Daya Manusiannya, dimana khusus di Kota Ternate, masih terdapat sejumlah UMKM yang terlambat untuk melengkapi usahanya dengan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sehingga menyebabkan UMKM terkait terlambat untuk sejumlah bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lainnya dalam rangka upaya pengembangan UMKM.
3. *Kemampuan intelektual yang terbatas dari pelaku UMKM* yaitu menyangkut keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi terkini, diantaranya menyangkut desain kemasan dan pemanfaatan teknologi terkini untuk meningkatkan pemasaran produk. Dimana, untuk desain kemasan pelaku UMKM umumnya masih bergantung pada pihak lain yang tentunya memerlukan biaya tambahan. Sedangkan, untuk pemasaran produk berbasis digital, masih terdapat pelaku UMKM yang belum dapat memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan lokal cukup efektif sebab mampu mempertahankan UMKM untuk tetap produktif, yang dilakukan kedalam beberapa tindakan antara lain :



- 1) Pengembangan UMKM oleh OPD terkait, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tupoksi instansi masing-masing dan bidang usaha yang dijalani oleh pelaku UMKM, diantaranya yaitu pembuatan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas UMKM, penyediaan data UMKM, pemberian sejumlah bantuan baik berupa alat dan bahan, pelayanan prima, memfasilitasi tersedianya pasar bagi produk-produk UMKM, promosi produk-produk khas Ternate dan lain-lain
  - 2) Pembinaan pelaku UMKM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan manajemen usaha dengan menjadikan pendekatan potensi kearifan lokal sebagai penunjang untuk mendukung ketersediaan bahan mentah dan kemampuan pelaku usaha.
  - 3) Mengusahakan tersedianya modal usaha bagi UMKM, melalui penyediaan data dan pelayanan administratif bagi UMKM yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan bantuan permodalan kepada pemerintah pusat, BUMN dan pihak swasta lainnya.
- Ketiga tindakan tersebut di atas, umum berupa peran-peran pemerintah yang bersifat *regulatif, service, fasilitatif* dan *evaluatif*.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM dalam mengelola produk Kearifan Lokal di Kota Ternate terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor internal antara lain :
    - 1) Keterbatasan modal usaha
    - 2) Mahalnya biaya infrastruktur yang menjadi penyebab tingginya nilai jual produk kearifan lokal yang dihasilkan oleh UMKM.
    - 3) Pelayanan birokrasi yang kurang efisien dari sisi sosialisasi dan penyebaran informasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan, faktor eksternal antara lain :

- 1) Pemasaran, yaitu menyangkut keterbatasan jumlah konsumen dan daya saing produk yang cukup rendah di pasar umum.
- 2) Kelembagaan dan SDM yaitu terkait UMKM yang belum melengkapi usahanya dengan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- 3) Keterbatasan kemampuan intelektual terhadap pemanfaatan teknologi terkini bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil temuan pada kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan dalam rangka optimalisasi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate antara lain :

1. Mendukung dan mengusahakan secara serius, mudah dan cepat terkait upaya-upaya penyediaan modal usaha bagi UMKM
2. Mengupayakan tersediannya industri atau yang lainnya untuk dapat melayani kebutuhan bahan baku atau perlengkapan produksi bagi UMKM
3. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang efisien dengan mengoptimalkan sosialisasi UMKM yang metara ke seluruh lapisan masyarakat, serta merencanakan program pembangunan UMKM yang terintegrasi.
4. Meningkatkan upaya-upaya pemasaran baik itu melalui iven-iven budaya yang dapat mendukung promosi produk UMKM, serta memanfaatkan teknologi terkini untuk kebutuhan pemasaran.
5. Mengupayakan tersedianya data induk untuk seluruh pelaku UMKM yang dilengkapi dengan legalitas usaha masing-masing.
6. Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pelaku UMKM berbasis teknologi terkini untuk mendukung kualitas produk dan pemasaran

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

- Bambang Sutikno dan Jati Batoro.2017. *Analisis Kearifan Lokal Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau di Kabupaten Pasuruan*. Universitas Brawijaya, Maia : Jurnal Ekonomi Islam
- Djohan, Djohermansyah. 2014. *Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia)*. Jakarta Pusat : IKAPTK
- Effendy, Khasan.2009. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV Indra Prahasta.
- Hasan, Erliana. 2014. *Komunikasi Pemerintahan. Edisi I*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Jamaludin, Nasrullah Adon. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : Pustaka Setia
- Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024
- Mansour Fakih. 2013. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun Anggaran 2018
- Suaib Hermanto, *Suku Moi* .2017. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. An Image
- Sugiyono. 2016. “*Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung” : Alfabeta.
- Sumijati AS, Suhartono, Marsono, S.U dan I. Dewa Putu Wijad. 2002.*Integrasi, Moral Bangsa, dan Perubahan*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta : Sinergi Press
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- Wilantara dan Susilawati. 2016. *Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung : Refika Aditama